

SEJARAH HIDUP, SETTING SOSIAL POLITIK, PEMIKIRAN POLITIK AL-FARABI dan AL-MAWARDHI

Egi Alhadi¹, Kholil Abwan Dalimunthe², Mahathir Muhammad Hutasuhut³,
Marzuki⁴

Egialhadi40@gmail.com¹, kholilabwan@gmail.com², Mahathirmuhammadhts@gmail.com³,
marzuki1100000173@uinsu.ac.id⁴

Universitas islam negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas tentang sejarah hidup, setting sosial politik, pemikiran politik al farabi dan al mawardi. yang mencakup riwayat hidup, pemikiran politik al farabi dan al mawardi. Tentunya topik ini sangat menarik untuk dikilas kembali dalam memaparkan tentang pemikiran politik al farabi dan al mawardi, Maka dalam artikel ini akan menelusuri kembali sejarah hidup, setting sosial politik, pemikiran politik al farabi dan al mawardi. Konsep politik Alfarabi merupakan derivasi dari perpaduan antara unsur Platonik, Aristotelian, dan konsep Islam. Negara ideal adalah negara yang mengelaborasi rasa kemanusiaan secara universal, tidak terbatas pada suku dan bangsa tertentu, melaksanakan ketundukan hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain.

Kata Kunci: sejarah hidup, alfarabi, almawardi

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat luas dan menyeluruh. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari aspek, hukum, filsafat, aqidah dan akhlaq, hingga aspek politik. Islam bukan agama sempit, yang hanya mengatur aspek ritual mengenai ibadah saja. Aspek-aspek kehidupan manusia di atas ada yang diatur oleh wahyu dengan aturan-aturan yang detail hingga petunjuk teknisnya seperti aspek ibadah

mahdhah dan ghairu mahdhah. Namun, ada pula aspek yang wahyu Allah itu hanya memberikan pedoman umum saja, sedangkan tata cara, teknis dan prosedurnya diserahkan oleh wahyu kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad.¹

Agama Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia yang tanpa terkecuali termasuk ke Indonesia, bahkan menjadi agama mayoritas di bumi Indonesia tercinta ini sekalipun dalam sejarah saat ajaran Islam mendarat di kepulauan Indonesia sudah banyak agama atau kepercayaan yang dianut penduduk Indonesia kala itu seperti animisme, Hindu, dan Budha. Bahkan sebelumnya telah banyak berdiri sederetan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Budha diberbagai daerah mulai kerajaan Kutai di Kalimantan Timur kerajaan Taruma.

Citra Islam sebagai peradaban dunia semakin meluas pada masa kekhalifahan Bani Umayyah walaupun disadari naik tahtanya Muawiyah bin Abu Sofyan adalah sebagai Khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat bahwa secara umum peradaban Islam semakin meluas, dan kesejahteraan cukup merata hal itu terbukti ketika masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz tidak lagi ditemukannya orang fakir maupun miskin bahkan orang yang berhak menerima zakat sekalipun.

Para pemikir barat memandang bahwa para pemikir muslim merupakan seorang pelopor etika pemikiran filsafat, tetapi tidak mempunyai keterlibatan penting dalam bidang pemikiran politik. Bahkan, mereka menganggap orang Islam tidak mempunyai pandangan yang jelas tentang pemikiran politik, dan bahwa agama dan peradaban islam tidak memiliki pemikiran politik apapun. Pendapat ini adalah kesalahan besar dan tidak benar

sama sekali. Sebab orang-orang Eropa pada abad ke-16 dan abad ke-17 tidak mengetahui secara sempurna karakteristik pemikiran politik orang-orang Islam.

1. Al-Farabi adalah salah satu tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dibahas. Dalam beberapa hal, khususnya tentang asal mula tentang timbulnya negara dan sistem pemerintahan hampir semua tokoh pemikir politik Islam klasik dan pertengahan seperti yang telah disebutkan di atas terdapat kesamaan atau kemiripan antara satu sama lainnya, yaitu tampak sekali adanya pengaruh alam pemikiran Yunani, dengan diwarnai oleh pengaruh aqidah Islam.
2. Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/sistem kemasyarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya mereka pun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum

tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berisi penjelasan tentang suatu masalah atau kondisi yang diteliti. Intinya, penelitian deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara menggambarkan suatu hasil yang diteliti. Tujuannya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta membenarkan fenomena yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembahasan ini akan diuraikan secara sistematis berdasarkan tema yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan, yaitu sejarah hidup, setting sosial politik, pemikiran politik al-Farabi dan al-Mawardi.

A. Sejarah Hidup

1. Riwayat Hidup Al-Farabi

Al-Farabi memiliki nama lengkap, Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Farabi, dan di dunia barat dikenal dengan nama Abu Nasher, Alfarabius atau Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Farab, Kazakhstan, pada tahun 872 M. Ia merupakan anak dari seorang Ayah Persia dan Ibu Turki, jadi filsuf satu ini bukan keturunan Arab, melainkan keturunan Persia-Turki. Al-Farabi memperoleh pendidikan berbagai disiplin ilmu, yaitu bahasa, sastra, logika, hingga filsafat. Ia belajar kepada guru-guru terkenal, seperti Abu Bakar Al-Saraj, Bisya Mattius bin Yunus, Yuhana Ibn Hailam dan lain sebagainya. Awal karirnya bermula saat ia berkenalan dengan sultan dinasti Hamadan di Aleppo, yaitu Syaifud Daulah al-Hamdani. Perkenalan ini membawanya sebagai ulama Istana, di sinilah ia mengembangkan

aktivitas filsafatnya. Namun karena pertentangan politik, ia keluar dari istana sampai kemudian wafat dalam usia 80 Tahun.²

Pada masa mudanya, ia pernah belajar bahasa Arab di Baghdad, kemudian belajar logika kepada Abu al-Basyar Matta ibn Yunus, dan belajar filsafat pada Yuhanna ibn Khailan. Ketika ia berusia 70 tahun, Jenderal Tuzun dari Dailam menyerang ibu kota Kerajaan Abbasiyah dan membunuh khalifah Muttaqi. Karena itu, ia meninggalkan Baghdad untuk selamanya. Selanjutnya, ia pindah ke Aleppo dan tinggal di sana di dalam istana Saif alDaulah, yang merupakan tempat pertemuan ahli-ahli ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa itu. Di sini, ia berkonsentrasi dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kegemaran membaca dan menulisnya sungguh luar biasa, dan ia sering melakukannya di bawah sinar lampu penjaga malam.³

2. Riwayat Hidup Al-Mawardi

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 364

H. atau 975 M. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang

besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi Negara.

B. Setting Sosial Politik

1. Al-farabi

Al-Farabi terkenal sebagai salah satu tokoh filsuf Islam yang memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan, dan memandang filoutar secara utuh, sehingga filsuf Islam yang datang sesudahnya, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd, banyak mengambil dan mengupas sistem filsafat nya, ia berusaha untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles melalui risalahnya al-Jam u Baina Ra'yay al-Hakimain, Aflathun wa Aristhu. Dalam bidang filsafat, ia digelari dengan al-Mu'allin al-Tsani (Guru Kedua), sedang yang digelari sebagai al-Mu'allim al-Awwal (Guru Pertama) ialah Aristoteles.

Hasil karya al-Farabi sebenarnya sangat banyak, akan tetapi sangat sedikit yang sampai kepada kita (dikenal masyarakat). Boleh jadi karena karangankarangan al-Farabi hanya berupa risalah (karangan pendek). dan sedikit yang berupa buku besar yang mendalam pembicaraannya. Kebanyakan katangannya telah hilang dan yang masih ada kurang lebih tiga puluh buah saja yang ditulis dalam bahasa Arab.

Al-Farabi sangat terkenal sehingga orang-orang Yahudi banyak yang mempelajari karangan-karangannya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Ibrani. Sampai sekarang salinan salinan tersebut masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan di Eropa. Ibnu Sina pernah mempelajari buku

Metafisika karangan Aristoteles, lebih dari empat puluh kali, tetapi belum juga mengerti maksudnya. Setelah ia membaca buku al-Farabi, Aghrâd Kitâb Mâ Ba`da al-Thabi'ah (Intisari Buku Metafisika), barulah ia mengerti apa yang selama ini ia rasakan sangat sukar. Di samping karya-karya al-Farabi tersebut, ia juga menulis karya-karya lain seperti:

1. Tahshil al-Sa'adah (Mencari Kebahagiaan).
2. `Uyún al-Masa'il (Pokok-pokok persoalan).
3. Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah (Pikiran-pikiran penduduk Kota Utama, Negeri Utama).
4. Ihsha' al-Ulûm (Statistik Ilmu).
5. Fushûsh al-Hikâm (Permata Kebijaksanaan).

Dalam bukunya Ihsha' al-'Ulûm dibahas berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu 'Ilm al-Lisân (Ilmu Bahasa), `Ilm al-Manthiq, 'Ilm al-Ta'alim (Ilmu Matematika), `lim al-Thabi`i (Ilmu Fisika), 'Ilm al-Nahi (Ilmu Ketuhanan), 'Ilm al-Madani (Ilmu Perkotaan), 'Ilm al-Figh (Ilmu Fikih), dan 'Ilm al-Kalam (Ilmu Kalam).

Pemikiran filsafat al-Farabi tampaknya merupakan perpaduan antara pemikiran-pemikiran filsafat sebelumnya, seperti Plato, Aristoteles, dan NewPlatonis, kemudian digabung dengan pemikiran-pemikiran keislaman. AlFarabi menyatakan bahwa perbedaan antara agama dan filsafat tidak mesti ada, karena keduanya mengacu kepada kebenaran. Kebenaran hanya satu, kendati posisi dan cara memperoleh kebenaran itu berbeda; yang satu menawarkan kebenaran, dan yang lainnya mencari kebenaran. Tetapi, kebenaran yang terdapat pada keduanya adalah serasi, karena bersumber dari akal aktif. Kebenaran yang diperoleh filsafat dengan perantaraan akal mustafad,

sedangkan Nabi mendapat kebenaran melalui perantara wahyu. Dengan demikian, filsafat Yunani tidak bertentangan secara hakikat dengan ajaran Islam. Namun tidaklah berarti al-Farabi mengagungkan filsafat dari agama. Ia tetap mengakui bahwa ajaran Islam mutlak kebenarannya. Oleh karena itu, alFarabi memandang bahwa paham emanasi Plotinus tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang penciptaan alam oleh Tuhan.

Menurut al-Farabi, Tuhan menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada dengan cara pancaran. Tuhan sebagai Akal Berpikir tentang Dirinya, dan dari pemikiran itu timbul suatu wujud lain. Tuhan merupakan Wujud :

1. (al-wujud al-awwal), dan dengan pemikiran itu timbul Wujud.
2. (al-wujûd al-tsani) yang juga mempunyai substansi.

Ia disebut Akal Pertama (al-'aql al-awwal), yang tidak bersifat materi. Wujud Kedua atau Akal Pertama berpikir tentang dirinya, dan timbul Langit Pertama.

Demikian seterusnya, Wujud Ketiga sampai Wujud Kesebelas/Akal Kesepuluh. Dari Akal Kesepuluh muncullah roh dan materi pertama yang menjadi dasar, yaitu: api, udara, air, dan tanah. Dari pikiran filsafat emanasi ini, al-Farabi mencela orang yang mengatakan bahwa alam ini kekal.

Dengan demikian, manusia terdiri dari dua unsur yaitu: pertama, substansi rohani dari alam amar atau amar Ilahi (jiwa), dan kedua, badan dari alam penciptaan (khalq) atau alam materi.

Pada dasarnya, al-Farabi membagi jiwa kepada tiga jenis, yaitu:

1. Jiwa tumbuh-tumbuhan (nabati) yang mempunyai tiga daya, yakni: daya makan (al-quwwah al-gaziyah), daya pemeliharaan (al-quwwah al-murabbiyah), dan daya berkembang (al-quwah al-muwallidah).
2. Jiwa hewani memiliki dua daya, yaitu: daya mengetahui (al-quwah al-mudrikah), dan daya penggerak (al-quwqh al-muharrakah).
3. Jiwa rasional (al-quwah al-nâthiqah), yang terbagi kepada dua bagian, yaitu: akal praktis (al-'aql al-'amali) dan akal teoretis (al-'aql al-nazary). Akal teoretis ini mempunyai tiga tingkatan yaitu akal potensi, actual dan mustafad. Akal mustafad merupakan bagian dari jiwa yang tidak mengalami kerusakan seperti kerusakan materi, dan dia abadi setelah badan mengalami kehancuran. Kontak akal mustafad

dengan Akal Kesepuluh Akal Aktif merupakan faktor yang membentuk kebahagiaan yang paling agung, dan kebahagiaan yang paling besar yang dapat dicapai oleh manusia, serta tidak ada kebahagiaan yang lebih besar darinya. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh al-Farabi tidak jauh berbeda dengan ekstasi pada Neo-Platonisme.⁴

2. Al Mawardi

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya merekapun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan.

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak al-Mawardi telah membuat Ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa.

dikalangannya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah. Oleh sebab itu, Ia beberapa kali ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Baghdad dalam pemerintahan Abbasiyah. Dan pada masa al-Qadir berkuasa (381 H/991 M – 423 H/1031 M) karir al-Mawardi meningkat, yaitu ia diangkat menjadi hakim agung (qadī al-

Qudāt), penasihat raja atau khalifah di bidang agama dan pemerintahan.

Disamping itu ia juga mengajar, banyak ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya. Diantaranya; Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib. Disamping mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah mengarang. Banyak kitab-kitab berharga yang diwariskan dalam berbagai bidang, seperti ushul fiqh, fiqh, hadits, tafsir, fiqh siyasah. Pada fiqh siyasah ini namanya menonjol karena bahkan sampai sekarang menjadi referensi untuk ilmu politik dan pemerintahan menurut fiqh Islam. al-Mawardi berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, dan hubungan negara dengan rakyat. Kondisi politik daulah

Abbasiyah pada masa hidup al-Mawardi akhir abad 10 M hingga pertengahan abad 11 M. Sangat berbeda dengan kondisi politik masa hidup Shahab al-Din Ahmad bin Abi Rabi (Abu Rabi) dan masa Abu Nasr al-Farabi, dua cendekiawan politik sebelum al-Mawardi. Kondisi politik pada masa al-Mawardi cenderung tidak stabil bahkan mengarah pada kondisi berantakan. Sebelum era al-Mawardi, Baghdad yang merupakan pusat peradaban dan poros negara Islam (Islamic state). Khalifah di

Baghdad adalah otak peradaban, jantung eksistensi negara, mempunyai power dan otoritas (wewenang) yang sangat kuat, menjangkau dan ditaati oleh seluruh penguasa daerah di lingkup daulah Abbasiyah.

Ironisnya, pada perkembangan selanjutnya, kekuatan dan otoritas kekhalifahan di Baghdad beransur-ansur susut, redup dan beralih kepada penguasa-penguasa daerah (lokal) dalam dinasti Abbasiyah seperti Turki, Persia dan daerah-daerah besar lainnya. Sejak itu, khalifah Baghdad hanya menjadi simbol formal pemerintahan, sedangkan real power (kekuatan yang sebenarnya) dan eksklusif pemerintahan dipegang oleh penguasa daerah itu. Untung saja, saat itu masih belum ada makar atau upaya mengukudeta (mengulingkan kekuasaan) Khalifah Abbasiyah di Baghdad untuk digantikan menjadi khalifah Turki atau Persia.

C. PEMIKIRAN POLITIK

1. Al-farabi

Teori politik Al Farabi sangat dikenal dengan konsep Madinal Fadhilah, Negara Utama. Konsep politik tersebut mengadopsi pemikiran politik Plato, the City State, bahkan dengan pola dan konsep yang hampir sama. Namun, karna latar belakangnya sebagai seorang muslim, Al Farabi menyesuaikan dengan ajaran agama yang ia anut. Sehingga, sering secara kasat mata, seolah-olah teori politik Al Farabi hanya pergantian istilah dari Yunani ke Istilah Islam, seperti konsep filosof sebagai pemimpin yang diajukan Plato menjadi konsep kualitas kenabian pada Al Farabi, sebuah kualitas yang hanya hampir dimiliki secara utuh oleh seorang filosof. Al Farabi memulai teori politiknya dari seputar agama.

Kemudian ia membangun sebuah landasan ilmu politik yang amat luas. Ia menyebutkan bahwa kepercayaan agama adalah opini-opini, dan gerakan ibadah adalah perilaku. Kedua hal tersebut dipimpin oleh penguasa yang mutlak atau seperti seorang Nabi bagi pengikutnya. Kemudian ia menggambarkan bahwa penguasa yang mutlak adalah penguasa yang memiliki tujuan yang sama seperti tujuan seorang Rasul (Muhammad). Alasan penyamaan tersebut adalah karena agama dan filsafat dalam Islam selalu memiliki ketergantungan baik dalam hal teoritis maupun praktis.

Selain menekankan akan perlunya seorang yang dianugerahi kemampuan mendekati seorang Nabi untuk memimpin secara bijak dan mampu memahami dan menjelaskan segala fenomena. Al Farabi juga menegaskan pentingnya agama untuk menyatukan masyarakat. Penting untuk menolong mereka mencapai kebaikan yang diinginkan oleh kehidupan politik. Ia juga menekankan pentingnya sebuah sistem kemasyarakatan untuk mewujudkan cita-cita Masyarakat Kota yang sempurna. Diinspirasi oleh pendapat kaum sufi, Al Farabi berpendapat bahwa manusia harus menekan egoisme dan kepentingan individual sampai kepada derajat yang paling bawah. Ia kemudian menjelaskan bahwa warga Negara harus secara bulat dengan penuh keikhlasan menghilangkan hak-hak pribadi demi kebahagiaan bersama serta Negara.¹⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa warga negeralah yang menjadi hal paling utama. Sebab merekalah yang memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah Negara. Sebuah Negara yang dipimpin oleh orang yang paling unggul diantara mereka secara pengetahuan dan kerohanian. Warga yang ideal menurut Al Farabi adalah warga memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan untuk mencapai kebaikan. Memiliki kecerdasan yang sanggup dikerahkan untuk mengali baik rahasia alam, fisik maupun non fisik

warga Negara ideal adalah mereka yang memiliki ideologi yang sama sebagai penanggung-jawab dari Negara yang dirikannya. Karenanya, setiap warga tidak boleh untuk tidak memiliki cita-cita yang dianutnya.

2. Al Mawardi

Menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.

Pelembagaan imamah, menurutnya, adalah fardhu kifayah ber dasarkan ijma ulama.⁵ Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah al-Khulafa' al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari bani Umayyah maupun bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan ma' la' yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).

Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara.

Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah), Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa'ilih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Di sisi lain, al-Mawardi juga berusaha mengembalikan kekuasaan bani Abbas dengan menegaskan bahwa hanya ada satu kepala negara untuk umat Islam dalam satu masa yang sama⁶. Pandangan ini merupakan upaya al-Mawardi mengantisipasi tuntutan Fathimiyah di Mesir yang ingin membentuk dinasti sendiri dan terpisah dari bani Abbas. Pengabsahan tuntutan ini tentu saja merupakan ancaman serius bagi keutuhan kekuasaan bani Abbas. Dengan pandangannya ini, al-Mawardi berusaha mempertahankan sisa-sisa kekuatan dinasti bani Abbas, setidaknya memperlambat kehancurannya.

Betapa pun, pemikiran-pemikiran al-Mawardi dalam beberapa sisi sangat menarik sekali untuk dicermati. Ia mampu keluar sedikit dari kerangk berpikir Sunni yang menempatkan kepala negara sebagai sosok yang seolah-olah tidak dapat tersentuh hukum. Beberapa pemikirannya bahkan sekarang menjadi acuan penegakan sistem pemerintahan modern.

KESIMPULAN

baik Al-Farabi maupun Al-Mawardi berkontribusi signifikan terhadap pemikiran politik Islam dengan cara yang berbeda. Al-Farabi menggabungkan filsafat Yunani dengan pandangan Islam, sementara Al-Mawardi menekankan pentingnya hukum Islam dalam legitimasi dan administrasi pemerintahan. Keduanya hidup dalam konteks sosial politik Kekhalifahan Abbasiyah, meskipun di era yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad syafii maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituanute*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Bahtiar Effendy *Dalam Wajah-Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002.
- budaya pluraisme, di Bellogio, Italia, November 1993.
- Indonesian Eperience, makalah seminar tentang agama dan
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia. 1984
- Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Komaruddin Hidayat (ed), *Islam, Negara, & Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Lihat Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- M. Dawan Rahardjo, *Intelektual Inteligesia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekawan Muslim*,
- M. Imam Aziz, *Agama Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993
- M. Syafi' i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Makna; *Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi, 1966- 1993*.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan*
- Mohammad Hatta, *Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.
- Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Idayu Press, 1977. Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999. Nurcholis Majid, *In Search Of Islamic Roots For*

Modern Pluralisme: The
Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011.